

RINGKASAN

**Silvia Dea Anggraini Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana
210510190 Perzinahan Dalam Kuhp Lama Dan Kuhp Baru
 (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023)**

(Dr. Zul Akli, S.H.,M.H, dan Sumiadi, S.H.,M.Hum.)

Perzinahan adalah suatu perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang sudah terikat dalam pernikahan sah dengan orang lain yang bukan pasangannya sah nya, atau dilakukan oleh dua orang yang salah satunya atau keduanya tidak pasangan yang sah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dan untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan implikasi hukum terhadap KUHP lama dan KUHP baru.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan sumber data digunakan ialah data primer diskritif yuridis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama Pasal 284 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru pasal 411 alasan perubahan substansi pengaturan tindak pidana perzinahan ialah norma Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama terbatas hanya menjerat pelaku perzinahan yang terikat perkawinan dan atas dasar aduan pasangan sah dengan ancaman tuntutan pidana penjara 9 bulan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dengan ancaman hukumannya ialah 1 tahun dan dend 10.000.000.00. Perubahan pengaturan tindak pidana perzinahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru merupakan hasil dari evolusi hukum yang mencerminkan pergeseran nilai dalam masyarakat Indonesia Terdapat pengaruh yang kuat dari nilai agama dan budaya dalam perluasan ruang lingkup pidana perzinahan, yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama.

Dalam penelitian ini disarankan kepada aparat penegakan hukum supaya dalam penanganan kasus ini tidak pilih kasih sehingga aturan hukum itu bisa dijatuhkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan pembuat pihak legislatif atau Undang-Undang diharapkan lebih spesifik nilai-nilai norma yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci: Perbandingan,Tindak Pidana zina,KUHP Lama,KUHP Baru

SUMMARY

Adultery is an act of sexual intercourse committed by a person who is already legally married to another person who is not his/her legal partner, or committed by two people, one or both of whom are legally married. The purpose of this study is to determine how the regulation of the crime of adultery is in the old and new Criminal Codes and to determine how the legal implications of the crime of adultery in the old and new Criminal Codes compare.

This research method uses a normative legal approach. With a legislative approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary, tertiary legal materials, and the data sources used are primary legal descriptive data.

The results of this study indicate that the old Criminal Code Article 284 limits the crime of adultery only to sexual relations committed by one of the married parties, and can only be processed if there is a complaint from a legal partner with the threat of a 9-month prison sentence, while the new Criminal Code Article 411 expands the scope of adultery to all sexual relations outside of marriage whether committed by married or unmarried parties, This difference reflects the shift in values in society and the state's efforts to adjust criminal law to developing moral and social norms with the threat of punishment being a maximum of 1 year in prison and a fine of 10,000,000.00. And concludes that although the new Criminal Code provides a wider space for moral protection, implementation and supervision must still prioritize the principle of caution so that there is no violation of privacy rights or abuse of the law.

In this study, it is suggested to law enforcement officers not to show favoritism in handling this case so that the legal regulations can be imposed in accordance with the applicable legal regulations, and the makers of the legislative or UUD are expected to be more specific about the values and norms that exist in society.

Keywords: Comparison, Criminal Act of Adultery, Old Criminal Code, New Criminal Code